

## Pelatihan Dan Pendidikan Politik Bagi Perempuan Perkotaan Menyongsong Pemilu 2024

Lusi Andriyani<sup>1,\*</sup>, Endang Sulastr<sup>2</sup>,  
Tria Patrianti<sup>3</sup>, Tria Astika Endah Permatasari<sup>4</sup>, Meri Prasetyawati<sup>5</sup>

<sup>1,2</sup>Ilmu Politik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH Ahmad Dahlan Cirende, 15412

<sup>3</sup>Komunikasi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH Ahmad Dahlan Cirende, 15412

<sup>4</sup>Ilmu Gizi, FKK, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH Ahmad Dahlan Cirende, 15412

<sup>3</sup>Teknik Industri, FT, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH Ahmad Dahlan Cirende, 15412

<sup>1,2,3,4,5</sup>LPPA, PWA DKI Jakarta, Jl. Kramat Raya No. 49 Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10430

\*E-mail [lusi.andriyani@umj.ac.id](mailto:lusi.andriyani@umj.ac.id)

### ABSTRAK

Pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan memahami calon legislatif dan juga calon presiden dan wakil presiden dengan lebih baik. Kondisi ini memberikan peluang bagi perempuan untuk hadir memberikan suara dalam menentukan pemimpin bangsa yang berkualitas. Jumlah perempuan yang banyak, merupakan peluang strategis untuk menentukan pemimpin yang mampu membawa bangsa menjadi lebih baik lagi. Salah satu posisi strategis dimiliki oleh perempuan yang berada di wilayah perkotaan. Tujuan pendidikan dan pelatihan, supaya perempuan perkotaan mengambil peran strategis sebagai subjek dengan memiliki pemahaman yang bagus dalam menyongsong pemilu tahun 2024 untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat. Metode yang dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah dialog interaktif dengan narasumber dan diskusi kecil. Hasil yang diperoleh dalam kegiatan ini didapatkan bahwa peserta antusias untuk berdialog terkait isu perempuan dan pemilu, sehingga diperoleh pemahaman yang bagus terkait peran perempuan khususnya perempuan di DKI Jakarta dalam menyiapkan diri menyongsong Pemilu tahun 2024 untuk demokrasi yang bermartabat.

**Kata kunci:** Perempuan dan politik, pemilu, demokrasi bermartabat, peran strategis perempuan

### ABSTRACT

*The implementation of the 2024 general election encourages the public to be more active and understand legislative candidates as well as presidential and vicepresidential candidates better. This condition provides an opportunity for women to be present to vote in determining quality national leaders. The large number of women is a strategic opportunity to determine leaders who are able to make the nation better. One of the strategic positions is held by women in urban areas. The aim of education and training is for urban women to take a strategic role as subjects by having a good understanding in approaching the 2024 elections to realize a dignified democracy. The method implemented in this activity is an interactive dialogue with resource persons and small discussions. The results obtained in this activity showed that participants were enthusiastic about dialogue regarding women's issues and elections, so they gained a good understanding regarding the role of women, especially women in DKI Jakarta, in preparing themselves for the 2024 elections for dignified democracy.*

**Keywords:** Women and politics, elections, dignified democracy, women's strategic role

## 1. PENDAHULUAN

Pemilu merupakan kegiatan rutin lima tahunan yang bertujuan untuk melaksanakan pemilihan pemimpin baru di Negara Indonesia. Bangsa Indonesia pemilu akan melaksanakan Pemilu tahun 2024. Kegiatan pemilu memberikan akses pada keterlibatan perempuan.

Jumlah perempuan memberikan pengaruh pada pentingnya perempuan dalam keterlibatan di pemilihan umum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan data BPS tahun 2020 – 2023, jumlah penduduk DKI Jakarta secara keseluruhan pada tahun 2022; di wilayah Kepulauan Seribu sebanyak 28.925, Jakarta Selatan 2.244.623, Jakarta Timur; 3.083.883, Jakarta Pusat 1.079.995, Jakarta Barat 2.448.975, Jakarta Utara 1.793.550. total jumlah penduduk DKI Jakarta 10.679.951.(Statistik, 2021)

Adapun dari sisi jumlah perempuan, jumlah penduduk di DKI Jakarta sampai tahun 2022 tergambar dalam tabel dibawah ini:

**Tabel. 1 Jumlah Perempuan di DKI Jakarta berdasarkan kelompok umur**

Kelompok Umur	Perempuan		
	2020	2021	2022
0-4	319 822	389 749	388 746
5-9	432 664	391 131	384 802
10-14	424 594	396 706	389 405
15-19	401 788	408 996	409 108
20-24	400 325	421 508	428 395
25-29	416 968	423 712	422 522
30-34	427 007	437 712	424 379
35-39	484 197	433 312	429 914
40-44	455 099	425 462	422 649
45-49	393 122	391 664	400 759
50-54	326 379	338 140	351 290
55-59	265 384	280 101	293 707
60-64	195 498	213 962	230 377

65+	284 460	329 873	371 157
<b>Jumlah</b>	<b>5 227 307</b>	<b>5 282 028</b>	<b>5 347 210</b>

Source Url: <https://jakarta.bps.go.id/indicator/>

Rancangan kota berdasarkan prioritas terdapat pada RPJMN 2020-2024 yaitu: 1 ibu kota negara, 4 kota baru, 10 kawasan perkotaan, dan 52 kota besar, menengah, dan kecil (RPJMN 2020-2024). Perkembangan perkotaan memberikan peluang bagi pemerintah dan masyarakat untuk beradaptasi. Salah satu permasalahan penting yang perlu mendapatkan perhatian adalah pemberdayaan perempuan perkotaan yang adaptif dan responsif terhadap situasi sosial dan politik.

Karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat perkotaan antara lain; heterogen, individualistis, rasional, sangat mobile secara sosial, beragam budaya dan lebih profesional. Karakteristik tersebut setidaknya mewakili kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk. Akselerasi yang cepat dan sikap rasional justru menjadi potensi penting untuk menggerakkan dan memberdayakan masyarakat perkotaan, khususnya kaum perempuan. Dengan jumlah dalam 5.347.210 pada tahun 2022 merupakan peluang besar bagi perempuan untuk ikut terlibat dalam segala sektor.

Dengan jumlah yang besar, perempuan akan mampu memengaruhi kebijakan yang dirancang oleh pemerintah. Untuk itu perlu pemberdayaan dan pendidikan politik bagi perempuan. Di tahun 2024 peran perempuan tetap menjadi prioritas.

Untuk menyongsong pemilu tahun 2024, perlu didorong partisipasi perempuan di bidang politik. Partisipasi sebagai elemen penting dalam sistem demokrasi dan menjadi salah satu alasan dilaksanakannya kegiatan pemberdayaan dan pendidikan politik perempuan di perkotaan. Partisipasi mempunyai makna keikutsertaan warga negara didalam proses politik dalam hal sebagai kontestan pemilu maupun sebagai pemberi suara. Partisipasi perempuan dikalahkan perpolitikan nasional perlu mendapat perhatian. Mengingat

tingkat partisipasi perempuan dalam lingkup eksekutif dan legislatif dinilai masih sangat minim.

**Tabel. 2 Prosentase Keterlibatan Perempuan DKI Jakarta di Parlemen**

Kota/kabupaten	Tahun 2021	Tahun 2022
DKI Jakarta	21.70	20.75
Kepulauan Seribu	21.70	20.75
Kodya Jakarta Selatan	21.70	20.75
Kodya Jakarta Timur	21.70	20.75
Kodya Jakarta Pusat	21.70	20.75
Kodya Jakarta Barat	21.70	20.75
Kodya Jakarta Utara	21.70	20.75

Dari komposisi jumlah perempuan di DKI Jakarta, terdapat 20,75% yang aktif diparlemen. Jumlah ini masih belum memenuhi 30% yang diharapkan (BPS, 2014). Untuk itu upaya mendorong pemberdayaan perempuan di bidang politik melalui pendidikan politik menjadi agenda yang penting dan harus dijalankan secara berkesinambungan .

## 2. METODE PELAKSANAAN

Dalam kegiatan pelatihan dan pendidikan politik perempuan perkotaan, menempatkan perempuan sebagai aktor penting dalam mendukung pelaksanaan pemilu di tahun 2024. Kegiatan yang menguatkan program pendidikan politik bagi perempuan yaitu adanya dukungan dari pemerintah daerah setempat. Adapun tahapan kegiatan pelatihan dan pendidikan politik bagi perempuan dilakukan melalui:

Tahap pendataan peminat dan peserta. Peserta pelatihan berasal dari kalangan pengurus dan aktivis perempuan yang dapat memberikan informasi untuk anggotanya terkait pentingnya mendukung pemilu tahun 2024 untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat.

Tahap perancangan materi pelatihan. Materi dan narasumber pelatihan dan pendidikan politik berasal dari profesional dan ahli dibidang politik dan

kajian gender. Hal ini bertujuan untuk memberikan bekal bagi perempuan terkait posisi dan perennya dalam mendukung pelaksanaan pemilu tahun 2024 untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat.



**Gambar 1.** Pelaksanaan Pendidikan Politik Bagi Perempuan Perkotaan di DKI Jakarta untuk mendukung pemilu berkeadaban menuju demokrasi yang lebih baik

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelang pemilihan umum, selalu menghadirkan isu-isu penting yang terkait dengan perempuan. Isu penting tersebut adalah rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen, sehingga memengaruhi isu kebijakan terkait kesetaraan gender serta kemampuan merespon masalah utama yang dihadapi perempuan di ruang publik (Hadiyono, 2015).

Pentingnya kehadiran perempuan dalam pengambilan keputusan merupakan cara untuk dapat mendorong pola penyusunan kebijakan yang lebih akomodatif dan substansial melalui gagasan-gagasan yang terkait dengan prundang-undangan yang berpihak pada kebutuhan perempuan dan anak.

Selain isu keterwakilan perempuan, terdapat Isu-isu lain yang mengharuskan peran serta dan keikutsertaan perempuan dalam pemilihan umum antara lain(Prof. Dr. Ma'mun Murod., 2023);

1. Independen penyelenggara Pemilu.
2. Netralitas lembaga survei .
3. Politik berbiaya mahal.
4. Politik uang
5. Pembelahan politik atau polarisasi masyarakat.
6. Politik puritan.

7. Keberpihakan ASN atau aparatur lain dalam mendukung dan memfasilitasi peserta pemilu.
8. Penggunaan media sosial untuk black campaign, penyebaran isu hoax, dan kebencian.
9. Politik identitas dipaham tak proporsional.

Peran perempuan dalam mengelola dan merespon secara positif isu-isu diatas menjadi salah satu agenda yang harus di implementasikan. Kuantitas perempuan yang banyak tidak hanya memberi sumbangan suara dalam pemilu, namun juga memberikan nilai positif pada kebijakanberprespektif gender.

### **Pentingnya Pendidikan Politik Bagi Perempuan:**

Keterwakilan perempuan dalam politik bisa dikatakan masih jauh dari harapan. Pendidikan politik merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membentuk dan memajukan kebijakan politik setiap individu dan kelompok.

Proses pendidikan politik dilaksanakan agar masyarakat pada umumnya menjadi warga negara yang sadar dan menghormati hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peduli terhadap keadilan dan kesetaraan gender (UNDP, 2010).

Keadaan ini dapat dilihat dengan adanya persepsi peran laki-laki dan perempuan dalam berbagai peran, publik. Perlu peningkatan peran perempuan dalam pembangunan berbasis gender sebagai bagian dari pembangunan nasional dalam upaya mewujudkan kemitraan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai kegiatan, khususnya di bidang politik (Hadiyono, 2015).

Perempuan mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu memahami dan menyatukan kesadaran akan pentingnya mengembangkan demokrasi yang sehat, adil dan realistis.

Sehingga pemberdayaan dan pendidikan politik bagi perempuan perlu ditingkatkan dari sebagai upaya penguatan pilar demokrasi melalui lembaga legislatif,

eksekutif, dan yudikatif. Hal ini sebagai bentuk respons terhadap aspirasi dan kepentingan perempuan.

Pendidikan politik bagi perempuan, harus dikembangkan untuk membangun kesadaran politik perempuan, dengan demikian perempuan dapat memanfaatkan peluang yang ada sesuai dengan potensinya dan peraturan yang berlaku.

Kebijakan khusus Affirmative Action harus segera ditransformasikan menjadi strategi Gender First Governance (PUG) di seluruh bidang kehidupan, terutama di semua pekerjaan dan kelas, untuk mempercepat kesetaraan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki.

Untuk mendukung program tersebut perlu adanya peningkatan jumlah kebijakan implementasi PUG yang dapat mengikat seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, penyelenggara pemilu, dan partai politik sebagai tulang punggung demokrasi, guna mendorong terwujudnya hak asasi manusia (HAM) serta hak perempuan dalam dunia politik.

Upaya ini juga mendorong peningkatan partisipasi perempuan, keterwakilan dalam pengambilan kebijakan serta untuk memperjuangkan kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai jumlah minimal dalam paket legislasi politik (Aceh, 2021).

### **Perempuan dan Pemilu 2024:**

Pentingnya perempuan dalam keikutsertaan di pemilu 2024 menjadi perhatian khusus. Terdapat tiga faktor yang dijadikan pijakan penting bagi perempuan:

1. Semakin banyak perempuan yang berpendidikan dan memiliki kesadaran pentingnya perempuan terjun ke dunia politik untuk berpartisipasi membangun Indonesia.
2. Terdapat tren politik nasional di era Orde Reformasi yang memberi alokasi 30 persen kepada kaum perempuan untuk menjadi calon anggota legislatif.
3. Banyak perempuan yang sudah berani tampil dan menduduki jabatan public

sebagai Walikota/Bupati di beberapa daerah.

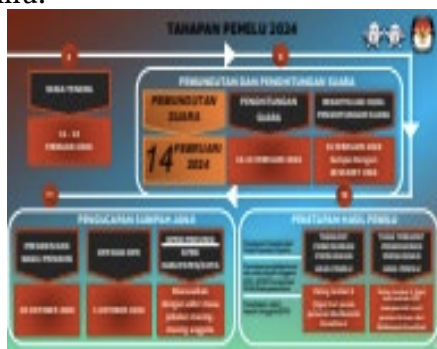
Ketiga hal diatas merupakan bentuk pijakan dasar untuk membangun harapan bagi perempuan untuk aktif dan berpartisipasi di jabatan publik. Harapan tersebut mendorong kaum perempuan untuk meningkatkan partisipasi dalam dunia politik.

Dalam menyongsong pemilu 2024, perempuan berharap dapat terwujud pemilu pemilu yang bersih, tidak ternoda oleh tindakan-tindakan yang merugikan pemilik demokrasi.

Strategi yang menarik dan sederhana bagi semua perempuan dalam meningkatkan partisipasi perempuan adalah berperan aktif membangun kesadaran dimulai dari rumah. Kesadaran bahwa partisipasi politik menjadi hal penting untuk diperhatikan. Karena partisipasi dalam dunia politik merupakan bagian penting dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan pemerintahan.

Strategi sederhana diatas dapat terwujud apabila dilakukan sosialisasi secara kontinu. Dengan demikian akan mendorong lahirnya kesadaran perempuan untuk terlibat dan berpartisipasi aktif di politik.

Perempuan juga harus mengetahui proses kegiatan dan tahapan pemilu 2024. Untuk itu perempuan juga harus memahami timeline dan waktu yang sudah dijadwalkan oleh KPU dalam proses Pemilu.



Gambar 1. Tahapan Pemilu Tahun 2024

#### 4. KESIMPULAN

Peserta antusias untuk berdialog terkait isu perempuan dan pemilu, sehingga diperoleh pemahaman yang bagus terkait peran perempuan khususnya perempuan di DKI

Jakarta dalam menyiapkan diri menyongsong Pemilu tahun 2024 untuk demokrasi yang bermartabat.

Terdapat 4 calon perempuan peserta pendidikan politik yang mencalonkan diri sebagai anggota legislative dan turut berpartisipasi dalam kontestasi pemilu 2024. Kehadiran perempuan sebagai bentuk kesadaran bahwa perempuan punya peluang untuk memberikan semua kompetensi untuk Indonesia lebih baik.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta dan LPPM yang telah memberikan dukungan penuh atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan LPPA Aisyiyah PWA DKI Jakarta.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, L. (2016). Politik Perkotaan di Surabaya pada Kepemimpinan Tri Rismaharini Tahun 2010-2015: Studi Kasus Revitalisasi Kampung Dolly.
- Aceh, P. D. I. (2021). KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA POLITIK DI ACEH (Studi Kasus: Keberadaan Anggota Legislatif Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Pada Tahun 2019-2024).
- BPS. (2014). Keterlibatan Perempuan Di Parlemen. Artikel. Diambil dari <https://www.bps.go.id/indicator/40/464/5/keterlibatan-perempuan-di-parlemen.html>, diakses pada tahun 2014
- Hadiyono, V. (2015). Memaknai Perempuan Dalam Kursi Parlemen. *Kisi Hukum*, 14(1), 7–25. Diambil dari <http://journal.unika.ac.id/index.php/kh/article/view/456>
- Prof. Dr. Ma'mun Murod., M. S. (2023). Isu Strategis dan Sikap Muhammadiyah.
- Statistik, B. P. (2021). Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin. ... *Dki-Jakarta-Menurut-Kelompok-Umur-Dan-Jenis-Kelamin ...*
- UNDP. (2010). Partisipasi Perempuan

dalam Politik dan Pemerintah.  
[http.www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)  
Ramadhani, M. M., Hartati, A., Jiwantara,  
F. A., Amane, A. P. O., Muharam, R.  
S., Bagenda, C., ... & Lopulalan, J. E.  
(2022). Pengantar Ilmu Politik.